



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN AWAL

# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA

# TAHUN 2025 - 2029



**KANTOR  
GABUNGAN DINAS 2**  
Jl. Kolonel Soetadji, Tanjung Selor  
Kode Pos 77212  
Telp. (0552) 2023121



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Sosial mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Dinas Sosial. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Sosial.

Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Kepala Dinas Sosial

Provinsi Kalimantan Utara



**Obed Daniel L.T., S.Hut., M.M.**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 197208221997031008



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Dasar Hukum Penyusunan</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Sistematika Penulisan</b>	<b>6</b>
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>8</b>
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	45
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	51
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	52
2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	53
<b>2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>54</b>
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	54
2.2.2 Isu Strategis	56
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>60</b>
<b>3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>
<b>3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah</b>	<b>66</b>
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>79</b>
<b>4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>79</b>
<b>4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan</b>	<b>205</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>208</b>
<b>5.1 Kesimpulan</b>	<b>208</b>
<b>5.2 Kaidah Pelaksanaan</b>	<b>208</b>
<b>5.3 Pengendalian dan Evaluasi</b>	<b>210</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Dinas Sosial dan UPT Panti TWMR	27
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	44
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	48
Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan	50
Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah	51
Tabel 2.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	54
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	55
Tabel 2.8 Perumusan Isu Perangkat Daerah	60
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial	65
Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas Sosial	74
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Sosial	76
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial	83
Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	88
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan UPT Panti Tresna Werdha Marga Rahayu	116
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	216
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	217
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	218
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	221



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	10
Gambar 2.2 Susunan Organisasi UPT Panti TWMR	10
Gambar 2.3 Susunan Organisasi UPT Panti TWMR	27
Gambar 2.4 Susunan Organisasi UPT Panti TWMR	27
Gambar 3.1 <i>Logical Framework</i> Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	66
Gambar 3.2 Pohon Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	67





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Dinas Sosial.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal,



penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, Renstra Kementerian Sosial, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 80);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang



Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

27. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045;
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 18);
33. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/57/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor... Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor...)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :



1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah



- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah
  - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah; dan
  - 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- 2.2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; dan
  - 2.2.2 Isu Strategis

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara. Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

- 5.1 Kesimpulan;
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan
- 5.3 Pengendalian dan Evaluasi



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam SK Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang uraian tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara mempunyai Tugas sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Taman Makam Pahlawan;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor mempunyai fungsi sebagai berikut :



1. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

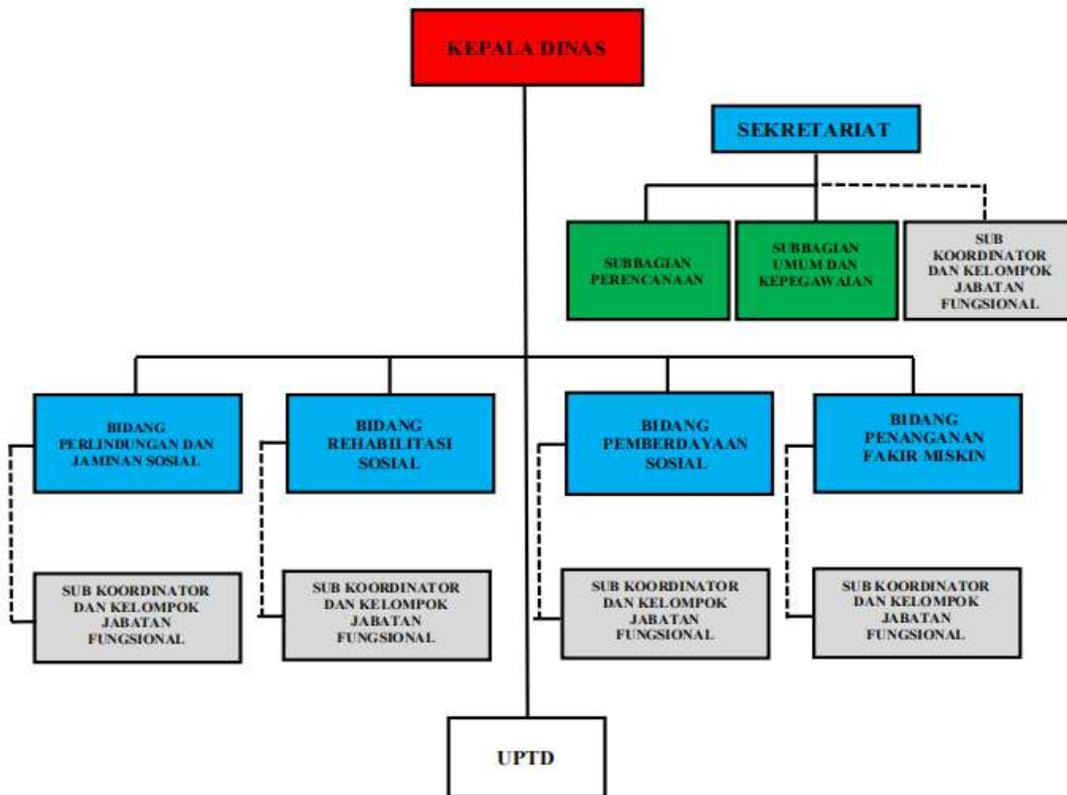
Secara struktural Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang dan membawahi 1 UPTD yaitu Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Marga Rahayu.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
  - a) Subbagian Perencanaan
  - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial membawahi :
  - a) Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :
  - a) Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :
  - a) Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
  - a) Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis

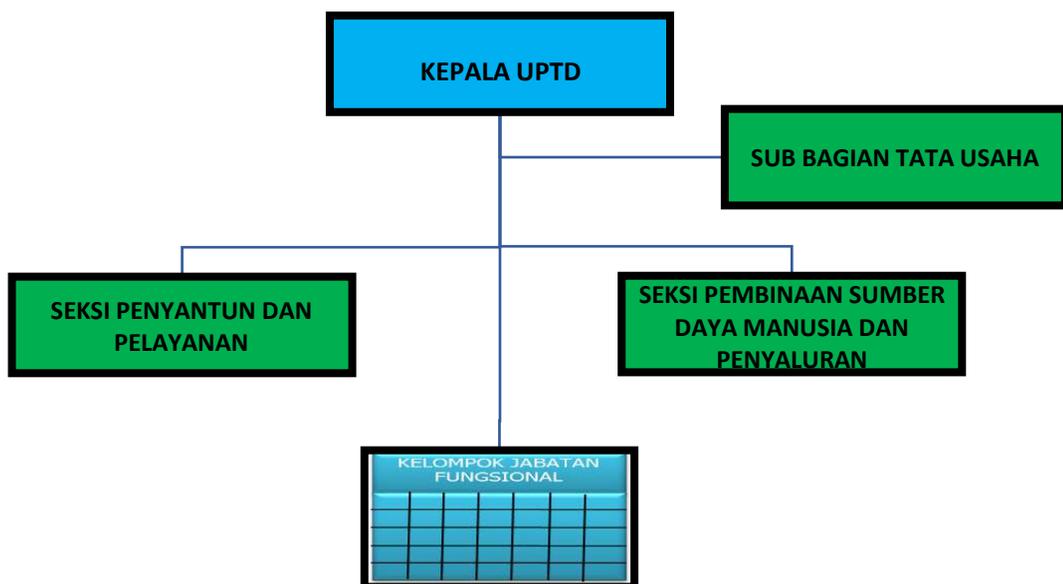


Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Prov. Kaltara



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor



Sumber : UPT Panti Tresna Werdha Marga Rahayu, 2025



### **2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas**

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan program sekretariat, bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang penanganan fakir miskin, UPTD panti sesuai dengan rencana kerja agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
2. Mengoordinasikan program sekretariat, bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang penanganan fakir miskin, UPTD panti sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
3. Membina kinerja program sekretariat, bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang penanganan fakir miskin, UPTD panti sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
4. Mengarahkan kinerja program sekretariat, bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang penanganan fakir miskin, UPTD panti sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan ;
5. Melaksanakan program sekretariat berdasarkan rencana kerja;
6. Melaksanakan program bidang rehabilitasi sosial berdasarkan rencana kerja;
7. Melaksanakan program bidang perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan rencana kerja;
8. Melaksanakan program bidang pemberdayaan sosial berdasarkan rencana kerja;
9. Melaksanakan program bidang penanganan fakir miskin berdasarkan rencana kerja;
10. Melaksanakan program UPTD panti berdasarkan rencana kerja;
11. Mengevaluasi dan melaporkan program sekretariat kepada atasan;
12. Mengevaluasi dan melaporkan program bidang rehabilitasi sosial kepada atasan;



13. Mengevaluasi dan melaporkan program bidang perlindungan dan jaminan sosial kepada atasan;
14. Mengevaluasi dan melaporkan program bidang pemberdayaan sosial kepada atasan;
15. Mengevaluasi dan melaporkan program penanganan fakir miskin kepada atasan;
16. Mengevaluasi dan melaporkan program UPTD panti kepada atasan;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas dan Kepala Sub Bagian**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial. Sekretaris mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan operasional kegiatan sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan, sub bagian umum dan kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kegiatan sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan, sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan kewenangan masing-masing;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan, sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan tugas masing-masing;
4. Menyelia pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan, sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan tugas masing-masing ;
5. Melaksanakan kegiatan sub bagian keuangan baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
6. Melaksanakan kegiatan sub bagian perencanaan baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;



7. Melaksanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian keuangan kepada atasan;
9. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian perencanaan kepada atasan;
10. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan subkegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan sesuai dengan rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat diselesaikan dengan baik;
3. Membimbing dan memeriksa kinerja bawahan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk peningkatan kinerja;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan subkegiatan;
5. Melaksanakan subkegiatan perencanaan dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan;
6. Melaksanakan subkegiatan evaluasi dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan;
7. Melaksanakan subkegiatan pelaporan dengan cara pendampingan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi evaluasi sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mengetahui permasalahan di lapangan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:



1. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan efektif dan efisien;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
4. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
5. Melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian (administrasi, penatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan inventarisasi barang serta pelayanan kepegawaian), baik teknis dan operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Mengevaluasi hasil kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
7. Melaporkan hasil kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan perencanaan yang ditetapkan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional**

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan operasional kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti kewenangan provinsi, pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
2. Membagi tugas kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan



NAPZA di dalam panti kewenangan provinsi, pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

3. Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti kewenangan provinsi, pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
4. Menyelia pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti kewenangan provinsi, pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan sesuai dengan tugas masing-masing;
5. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti kewenangan provinsi, pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti kewenangan provinsi, pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan kepada atasan;
7. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program kegiatan terkait pengelolaan data kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin sebagai dasar pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan berbagai pihak dari instansi pemerintah lain, organisasi masyarakat, dan swasta;
3. Mengelola penyaluran bantuan sosial dan melaksanakan program-program jaminan sosial penanganan fakir miskin untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan pendataan data fakir miskin dan ppks serta pengelolaan pemutakhiran data secara berkelanjutan untuk cakupan daerah kota;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, serta menyusun laporan hasil kegiatan;
6. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup bidang penanganan fakir miskin berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan operasional kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Masyarakat dan penyuluh sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial sebagai dasar pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Masyarakat dan penyuluh sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial sesuai dengan kewenangan masing-masing;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Masyarakat dan penyuluh



sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

4. Menyelia pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Masyarakat dan penyuluh sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial sesuai dengan tugas masing-masing;
5. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Masyarakat dan penyuluh sosial baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. Melaksanakan kegiatan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Masyarakat dan penyuluh sosial kepada atasan;
9. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil kepada atasan;
10. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial kepada atasan;
11. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pejabat Fungsional mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah rawan sosial;
2. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah rawan sosial;
3. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;



4. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu di daerah rawan sosial;
5. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas atau massal di daerah rawan sosial;
6. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
7. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
8. Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/massal di daerah rawan sosial;
9. Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
10. Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
11. Membahas rencana penyuluhan sosial sebagai penyaji;
12. Membahas rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
13. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga;
14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
16. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga;
17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga;
18. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
19. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
20. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
21. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;



22. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
23. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
24. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
25. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
26. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
27. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
28. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
29. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
30. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penulis naskah;
31. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pengatur laku;
32. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penyaji;
33. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pembahas;
34. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
35. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak;
36. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;



37. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas;
38. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
39. Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah non rawan sosial;
40. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan perumusan gambaran umum tentang kondisi, situasi, isuisu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan;
41. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penetapan sasaran garapan penyuluhan sosial;
42. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan assesmen kelompok sasaran dan lingkungan sosialnya;
43. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan rencana penyuluhan sosial;
44. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan materi penyuluhan sosial;
45. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial;
46. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
47. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
48. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
49. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
50. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
51. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
52. Menjadi pengatur laku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll);



53. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
54. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
55. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
56. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
57. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
58. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
59. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
60. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial masal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
61. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial masal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
62. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial masal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial sebagai ketua;
63. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial masal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial sebagai anggota;
64. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;



65. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
66. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
67. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
68. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
69. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
70. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
71. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
72. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
73. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
74. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
75. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
76. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;



77. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
78. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
79. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
80. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
81. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
82. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
83. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
84. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
85. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
86. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
87. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
88. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;



89. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
90. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
91. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai ketua;
92. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota;
93. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai penyaji;
94. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai pembahas;
95. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai peserta;
96. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai ketua;
97. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota;
98. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk mediacetak sebagai penyaji;
99. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk mediacetak sebagai peserta;
100. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll) dalam tim sebagai ketua;
101. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll) dalam tim sebagai anggota;
102. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll) dalam tim sebagai penyaji;



103. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll) dalam tim sebagai peserta;
104. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
105. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sebagai peserta;
106. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
107. Diseminasi hasil kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
108. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
109. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
110. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
111. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
112. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
113. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
114. Diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
115. Diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
116. Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
117. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
118. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
119. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
120. Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;



121. Melakukan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;
122. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta;
123. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai ketua;
124. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai anggota.

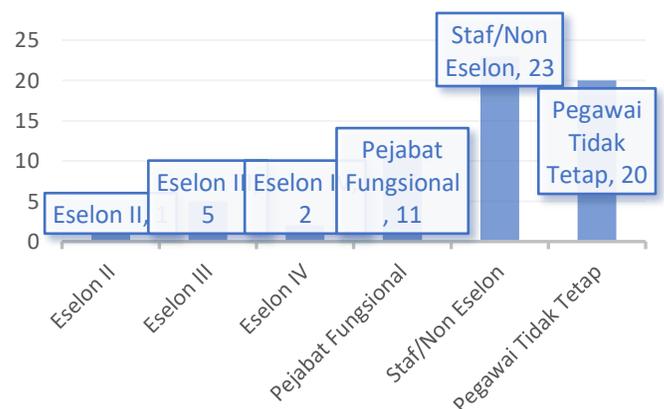
### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.

#### 2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Sosial

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Sosial sesuai struktur organisasi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 42 Orang, yang terdiri dari:

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 5 Orang
3. Eselon IV : 2 Orang
4. Pejabat fungsional : 11 Orang
5. Staf/Non Eselon : 23 Orang
6. Pegawai Tidak Tetap: 20 Orang

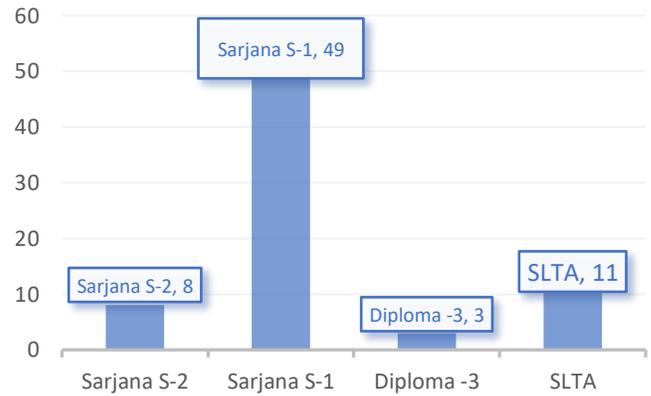


**Gambar 2.3 SDM Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial sebanyak 42 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 8 Orang
2. Sarjana S-1 : 49 Orang
3. Diploma -3 : 3 Orang
4. SLTA : 2 Orang



**Gambar 2.4 Tingkat Pendidikan SDM Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara**

### 2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Sosial

#### 1. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Dinas Sosial dan UPT Panti TWMR**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Mesin Ketik	✓		1
2	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Filling Kabinet)	✓		2
3	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari Arsip)	✓		4



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
4	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Brangkas)	✓		1
5	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari Kayu)	✓		5
6	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Rak Koran)	✓		1
7	Alat Kantor Lainnya (Alat Penghancur Kertas)	✓		2
8	Alat Kantor Lainnya (GPS)	✓		1
9	Alat Pendingin (Lemari Es)	✓		1
10	Alat Pendingin (AC)	✓		1
11	Alat Rumah Tangga Lainnya (Televisi)	✓		2
12	Alat Rumah Tangga Lainnya (Sarana Akses Bagi Disabilitas/Pagar)	✓		1
13	Komputer PC (Hp)	✓		1



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
14	Laptop (Hp)	✓		8
15	Printer (Epson)	✓		4
16	Meja Kerja	✓		15
17	Meja Pejabat Eselon 2	✓		1
18	Meja Rapat	✓		1
19	Kursi Kerja	✓		17
20	Kursi Tamu	✓		1
21	Peralatan Studio Visual (Kamera)	✓		2
22	Alat Komunikasi (Telephone)	✓		1
23	Software (Website)	✓		1
24	AC Central (Polytron & Gree)	✓		2
25	AC Split (Samsung)	✓		4



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
26	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari Arsip)	✓		3
27	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Filling Cabinet)	✓		2
28	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Rak Piring)	✓		1
29	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dispenser)	✓		1
30	Pengadaan Personal Komputer (Komputer)	✓		5
31	Pengadaan Personal Komputer Laptop (Asus)	✓		5
32	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (CCTV)	✓		1
33	Peralatan Perlengkapan Kantor (Printer)	✓		3



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
34	Peralatan Perlengkapan Kantor (Wireless)	✓		1
35	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Brankas)	✓		1
36	Pengadaan Alat Studio (Microfon)	✓		1
37	Pengadaan Alat Studio (Proyektor dan layar)	✓		1
38	Scanner (Epson)	✓		1
39	Gorden	✓		1
40	Mobil Inova (Pembagian dari Biro Umum)	✓		1
41	Mobil Operasional (Hilux)	✓		1
42	Meja Kayu	✓		5
43	Kursi Kayu	✓		7
44	Meja Kerja Biro	✓		1



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
45	Meja Kerja ½ Biro (Activ)	✓		11
46	Kursi Kerja (Chitose)	✓		6
47	Kursi Kerja (Malvin)	✓		3
48	Mobil Dapur Lapangan	✓		1
49	Mobil Rescue	✓		1
50	Truk	✓		1
51	Mobil Tangki Air	✓		1
52	Motor Lapangan	✓		2
53	Meja Reseptionis	✓		1
54	Kursi Besi Tamu	✓		1
55	Printer (Epson L3110)	✓		4
56	Laptop (Asus)	✓		2
57	PC (HP)	✓		4
58	Mobil (Toyota Rush)	✓		1



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
59	Sepeda Motor	✓		6
60	Penyemprot Mesin	✓		2
61	Lemari Besi	✓		3
62	PC (Lenovo)	✓		1
63	Laptop (Lenovo)	✓		4
64	Printer (Epson/L6160)	✓		2
65	Printer (Epson/L3110)	✓		4
66	UPS	✓		6
67	Penyekat Ruang Praktisi Kayu	✓		1
68	Meja Kerja (Activ)	✓		10
69	Kursi Putar	✓		10
70	Sofa	✓		1
71	Lemari Es	✓		1



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
72	Kipas Angin	✓		4
73	Tangga Lipat	✓		1
74	Note Book	✓		2
75	Bor Listrik	✓		1
76	Laptop (Axioo Mybook Pro K5 / Cor i5)	✓		3
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	✓		2
78	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	✓		2
79	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya (dst)	✓		1
80	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	✓		1
81	CCTV-Camera Control Television System	✓		1
82	Sofa	✓		1



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
83	A.C Split (Samsung)	✓		4
84	Sound System	✓		1
85	Karpet	✓		1
86	Stasion Wagon Toyota/Rush S M/T GR Sport (Hitam Metalik)	✓		3
87	Pick Up	✓		1
88	Alat Rumah Tangga Lain- Lain (Palyground Set)	✓		1
89	Hand Talky (HT)	✓		1
90	Sepeda Motor (Honda/ X1H02N32L1A/T)	✓		8
91	Sepeda Motor (Tangkas X7 Putih)	✓		1
92	Telephone Mobile	✓		1
93	Laptop (Axioo / Mybook K5 Pro)	✓		10



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
94	Printer (Peralatan Personal Komputer, EPSON /L5290)	✓		4
95	Scanner (Peralatan Personal Komputer, Epson /DS 410)	✓		4

Sumber: Pengurus BMD Dinas Sosial Prov. Kaltara, 2025

## 2. Sarana dan Prasarana UPT Panti Tresna Werdha Marga Rahayu

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Kendaraan Roda 4	✓		1
2	Kendaraan Roda 2	✓		2
3	CCTV	✓		1
4	Sound Sistem	✓		1
5	Penghancur Kertas	✓		1
6	Laptop	✓		2



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
7	Printer HP 14-BW501AU	✓		1
8	Printer Epson L360 Multifunction Injeckt	✓		1
9	Kursi Makan Lansia Kayu	✓		1
10	Meja Makan Lansia Besi	✓		1
11	Lemari Arsip	✓		2
12	Alat Pemanas Ruangan Ariston	✓		59
13	Kipas Angin Regency	✓		2
14	Kipas Angin Miyako	✓		4
15	Kipas Angin Lenta CSF	✓		1
16	Kipas Angin Sekai LSF	✓		1
17	Rice Cooker (Alat Dapur)	✓		58
18	Rice Cooker (Young Ma)	✓		1
19	Rice Cooker (Twin Cooler)	✓		1



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
20	Televisi	✓		1
21	Ge Detector (Planner + Coaxial)	✓		1
22	Hardisk	✓		1
23	Rice Warmer	✓		80
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (kompor Gas)	✓		2
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dispenser)	✓		2
26	Peralatan perlengkapan kantor (Mesin Absensi)	✓		1
27	Peralatan Perlengkapan Kantor (Scanner)	✓		1
28	Pengadaan Personal Komputer (Laptop Asus & Toshiba)	✓		3



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
29	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Mimbar/Podium)	✓		1
30	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Spring Bad)	✓		33
31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Spray dan Bantal)	✓		33
32	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Ambal dan Lukisan)	✓		33
33	Hardisk	✓		6
34	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	✓		1
35	Bangunan Gedung Permanen	✓		1
36	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	✓		1



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
37	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	✓		1
38	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	✓		1
39	Sepeda Motor (Honda/New Blade double brake disc brike)	✓		1
40	Bangunan Gedung Tempat Pos Jaga	✓		1
41	Bangunan Gedung Tempat kerja/ Kantor	✓		1
42	Gerobak Dorong	✓		1
43	Baggage Trolley	✓		1
44	Lemari Kayu	✓		1
45	Meja Panjang	✓		1
46	Lemari Es	✓		1
47	Kompur Gas	✓		2



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
48	Rice Cooker (Penanak Nasi gas 10 Liter)	✓		1
49	Rice Cooker (Jumbo 6 kg)	✓		1
50	Oven Listrik	✓		1
51	Rak Piring Alumunium	✓		1
52	Blender	✓		2
53	Televisi (Panasonic / C 304)	✓		10
54	Dispenser	✓		9
55	Gordyin/ Kray	✓		66
56	Bracket Standing Peralatan	✓		10
57	Tangki Air	✓		1
58	Rak Peralatan	✓		1
59	Chopper	✓		1
60	Refrigerator/ Freezer	✓		1



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
61	Laptop (Acer)	✓		1
62	Printer (Epson / L4150)	✓		1
63	Lemari Kayu	✓		1
64	Kursi Staf	✓		13
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	✓		2
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	✓		1
67	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	✓		2
68	Pc Komputer (Acer)	✓		1
69	Printer	✓		1
70	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	✓		1
71	Kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	✓		1
72	Laptop (Lenovo)	✓		2



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
73	Alat Kesehatan Umum Lainnya (Tongkat Keruk)	✓		2
74	Alat Kesehatan Umum Lainnya (Tongkat Kaki)	✓		2
75	Alat Kesehatan Umum Lainnya (Kursi Roda)	✓		2
76	Sound Sistem	✓		1
77	Prinjer Print	✓		1
78	AC (Politron & Gree)	✓		2
79	AC (LG)	✓		1
80	AC (Samsung)	✓		7

Sumber: Pengurus BMD UPT Panti TWMR, 2025

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan UPT Panti TWMR berada dalam kondisi baik. Kondisi ini berpotensi meningkatkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, tetap diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.



### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

**Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara**

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Presentase PMKS yang Mandiri	1,60%	-	-	-	-	3,23%	-	-	-	-	201,8%	-	-	-	-
1.	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	-	39.277	40.118	40.997	41.878	-	39.529	38.306	66.062	39.960	-	100,64	95,48	146,50	95,63



No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Persentase PSKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	-	10%	20%	30%	40%	-	30,19%	25,61	32,57	39,54	-	301,86	128,05	108,56	98,86
3.	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya d	-	1,12%	4,78%	14,09%	24,04%		16,72%	30,76	20,03	51,25	-	1.492,86	643,51	142,16	213,18
4.	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	n/a	n/a	40	60	80		100	100	100	100	-	100	100	100	100



No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	n/a	n/a	50	70	90		100	100	100	100	-	100	100	100	100
6.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	n/a	n/a	80	90	100		100	100	100	100	-	100	100	100	100
7.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	n/a	n/a	40	60	80		100	100	100	100	-	100	100	100	100
8.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada	n/a	n/a	100	100	100		100	100	100	100	-	100	100	100	100



No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi															

Sumber: LPPD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, Data Diolah, 2025

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut



Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>DINSOS</b>															
Belanja Langsung	9.694.998.737	-	-	-	-	7.115.559.035	-	-	-	-	73,39	-	-	-	-
Belanja Tidak Langsung	2.180.758.707	-	-	-	-	1.493.240.094	-	-	-	-	68,47	-	-	-	-
<b>UPT PANTI</b>															
Belanja Langsung	2.380.961.531	-	-	-	-	2.105.961.531	-	-	-	-	88,45	-	-	-	-
Belanja Tidak Langsung	608.661.121	-	-	-	-	591.790.925	-	-	-	-	97,23	-	-	-	-
Belanja Pegawai	-	6.706.022.542,00	7.830.568.048,00	8.365.063.833,00	8.980.698.076,00	-	5.415.123.899,00	7.567.480.988,00	8.081.295.525,00	8.703.376.759,00	-	80,75	96,64	96,60	96,91
Belanja Barang dan Jasa	-	7.591.847.084,00	6.315.847.098,00	7.280.722.540,00	10.894.917.433,00	-	6.394.814.004,00	5.887.106.201,00	6.976.580.524,00	10.586.801.425,00	-	84,23	93,21	95,82	97,17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	93.034.860,00	737.516.368,00	1.603.532.600,00	1.125.916.560,00	-	72.935.000,00	719.866.368,00	1.568.057.500,00	1.092.327.516,00	-	78,39	97,60	97,78	97,01
<b>Total Anggaran</b>	<b>14.865.380.096,00</b>	<b>14.390.904.486,00</b>	<b>14.883.931.514,00</b>	<b>17.249.318.973,00</b>	<b>21.001.532.069,00</b>	<b>11.306.551.585,00</b>	<b>11.882.872.903,00</b>	<b>14.174.453.557,00</b>	<b>16.625.933.549,00</b>	<b>20.382.505.700,00</b>	-				

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, Data Diolah, 2025

Pada Tahun 2021 Rasio untuk Belanja Pegawai (96.84%), Belanja Barang dan Jasa (93.21%), dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (97.80%) menunjukkan kinerja yang baik, terutama pada belanja modal yang hampir mencapai 100%. Kemudian pada tahun 2022 Rasio untuk Belanja Pegawai (96.60%) dan Belanja Barang dan Jasa (95.82%) tetap baik, meskipun sedikit menurun dibandingkan 2021.



Lalu pada tahun 2023, Rasio untuk Belanja Pegawai (96.91%) dan Belanja Barang dan Jasa (97.17%) menunjukkan peningkatan, terutama pada belanja barang dan jasa yang mencapai kinerja terbaik. Tahun dengan rasio kurang baik <95%, terjadi di tahun 2020 Rasio untuk Belanja Pegawai (60.75%) sangat rendah, menunjukkan ketidaksesuaian antara realisasi dan anggaran. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterlambatan dalam pelaksanaan program atau penyerapan anggaran. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2020 (78.39%) juga menunjukkan kinerja kurang baik, meskipun membaik di tahun-tahun berikutnya.

Proses penganggaran dan realisasi yang rumit atau tidak efisien dapat menghambat penyerapan anggaran, seperti terlihat pada tahun 2020. Adanya perbaikan prosedur di tahun-tahun berikutnya akan dapat berkontribusi pada peningkatan rasio realisasi. Keterbatasan personil atau kurangnya kompetensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat memengaruhi kinerja, terutama pada belanja modal yang memerlukan keahlian khusus. Perencanaan yang lebih matang dan monitoring yang ketat di tahun-tahun berikutnya mungkin meningkatkan progres pelaksanaan.



### 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara selama periode perencanaan strategis.

**Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	<i>Rehabilitasi Sosial</i>	<i>Rehabilitasi di dalam Panti, Pendampingan, Konseling, Pemulangan ke Daerah Asal</i>	<i>Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti, Gelandangan dan Pengemis</i>
2.	Penanganan Fakir Miskin	<i>Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)</i>	<i>Keluarga fakir miskin / pra-sejahtera</i>
3.	<i>Penanganan Bencana</i>	<i>Bantuan Sosial, Logistik Kebencanaan</i>	<i>Pengungsi akibat bencana alam (banjir, kebakaran hutan, dll)</i>
4.	<i>Rehabilitasi Sosial</i>	<i>Perlindungan dan pendampingan hukum</i>	<i>Anak yang berhadapan dengan hukum, korban konflik sosial atau kekerasan</i>
6.	<i>Pemberdayaan Sosial</i>	<i>Pelatihan/Bimbingan Teknis Penguataan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</i>	<i>PSKS Perseorangan, Keluarga, dan Kelembagaan</i>

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, 2025



Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

### 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan urusan sosial. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

**Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah**

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>Kementerian Sosial RI</i>	<i>Penyaluran Bantuan PKH, Sembako</i>	<i>Terlaksananya penyaluran bantuan PKH dan Sembako yang tepat sasaran</i>
2.	<i>Dinas Sosial Kabupaten/Kota</i>	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Program terkait urusan sosial</i>	<i>Terlaksananya koordinasi yang baik dan fasilitasi seperti monitoring dari penyaluran bantuan sosial dari pusat</i>



No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Koordinasi terkait penanganan bencana	Terlaksananya koordinasi yang baik dalam menghadapi penanganan bencana
4.	Dinas Kesehatan	Koordinasi terkait layanan disabilitas, ODGJ	Terlaksananya koordinasi yang baik dalam melayani disabilitas dan ODGJ
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi terkait perlindungan anak dan lansia	Terlaksananya koordinasi yang baik dalam menghadapi penanganan bencana
6.	Perusahaan melalui CSR (Perusahaan sawit dan pertambangan)	Koordinasi dan fasilitasi dengan perusahaan melalui forum CSR	Terlaksananya koordinasi yang baik dalam menjalin kerjasama melalui forum CSR
7.	Panti Sosial dan LKS	Koordinasi terkait pendataan di Panti Sosial dan LKS yang terdaftar	Terlaksananya pendataan di Panti Sosial dan LKS yang terdaftar
8.	Organisasi Disabilitas dan Kemanusiaan, Kelompok Masyarakat Peduli Sosial	Koordinasi terkait dengan program serta kegiatan yang inklusif berkaitan dengan organisasi disabilitas dan kelompok masyarakat peduli sosial	Terlaksananya forum inklusif untuk organisasi disabilitas dan Kemanusiaan, Kelompok Masyarakat Peduli Sosial
9.	Karang Taruna, Relawan Sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Koordinasi terkait pemberdayaan pemuda, penanganan	Terlaksananya koordinasi yang baik terkait pemberdayaan pemuda, penanganan sosial, dan



No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
		sosial, dan penanganan darurat bencana	penanganan darurat bencana
10.	DKISP	Koordinasi dan Sosialisasi program melalui media online	Terlaksananya koordinasi dan Sosialisasi program melalui media online dalam pelaksanaan program dan kegiatan
11.	SKALA	Koordinasi dan Sinkronisasi Program dalam pelayanan urusan sosial	Terlaksananya koordinasi yang baik dalam pelayanan urusan sosial dengan SKALA

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah**

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara bertugas untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin dapat mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap jenis kerja sama yang telah dilakukan



dan evaluasi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menilai efektivitas serta keberlanjutan dari kerja sama tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah yang ada.

**Tabel 2.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah**

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>Dinas Sosial Kabupaten Berau</i>	<i>Pelayanan rujukan lanjut usia terlantar dari Kabupaten Berau</i>	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti yang merupakan Standar Pelayanan Minimal</i>

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Kerja sama daerah yang tercantum dalam tabel ini memainkan peran penting dalam mendukung kinerja Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerja sama ini memungkinkan Dinas Sosial untuk memperluas kapasitas dan cakupan layanan yang diberikan, baik melalui penyediaan sumber daya, pembagian tanggung jawab, maupun koordinasi dalam pelaksanaan program-program prioritas. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian hasil yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan



yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

**Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	<b>Keterbatasan Akses Bantuan Sosial</b>	Tidak meratanya distribusi bansos (PKH, BST) ke daerah terpencil seperti perbatasan Nunukan atau pedalaman Malinau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur transportasi yang kurang baik</li> <li>- Data penerima tidak terupdate (dukcapil belum akurat).</li> <li>- SDM petugas terbatas.</li> </ul>
2.	<b>Rendahnya Kapasitas SDM</b>	Petugas lapangan (Pekerja Sosial) kurang terlatih dalam pendampingan kelompok disabilitas atau korban trafficking.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya pelatihan teknis.</li> <li>- Alokasi anggaran pelatihan rendah.</li> <li>- Turnover petugas tinggi.</li> </ul>
3.	<b>Ketidakkuratan Data Penerima Manfaat</b>	Bansos kerap salah sasaran (masuk ke warga mampu) atau justru tidak sampai ke kelompok rentan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan desa/kelurahan lemah.</li> <li>- Sistem database (DTKS) tidak terintegrasi.</li> <li>- Kurangnya verifikasi lapangan.</li> </ul>
4.	<b>Minimnya Layanan Rehabilitasi Sosial</b>	Tidak ada panti rehabilitasi untuk gelandangan, pengemis dan pecandu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran terbatas.</li> <li>- Tidak ada mitra LSM khusus.</li> </ul>



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		narkoba atau korban kekerasan di Kaltara.	- Fokus kebijakan lebih ke bansos darurat.
5.	<b>Kurangnya Partisipasi Masyarakat</b>	Program pemberdayaan (KUBE, pelatihan UMKM) tidak dimanfaatkan optimal oleh masyarakat rentan	- Kurang pendampingan lanjutan. - Budaya ketergantungan bansos.

Sumber: Data dari Bidang pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Sosial Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai berikut:

#### 2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Demografi global. Peningkatan arus migrasi (pengungsi, pekerja migran, korban trafficking) akibat konflik, perubahan iklim, atau kesenjangan ekonomi. Contoh: Masuknya pekerja migran ilegal di perbatasan Nunukan-Malaysia.



2. Perubahan iklim. Krisis iklim memicu bencana alam (banjir, kekeringan) yang mengakibatkan pengungsian massal. Contoh: Banjir Sungai Kayan di Kaltara yang mengganggu akses bansos.

#### **2.2.2.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga**

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional. Adapun isu strategis K/L yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah PMKS (seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak jalanan, pengemis, dll.) akibat dampak ekonomi dan sosial;
2. Kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi terhadap kelompok rentan (anak, perempuan, disabilitas, korban bencana);
3. Ketergantungan pada bansos tanpa solusi berkelanjutan;
4. Bencana alam/krisis sosial (pengungsian, konflik, dll.);
5. Transformasi digital layanan kesejahteraan sosial;
6. Fenomena sosial baru (misal: gelandangan psikotik, penyalahgunaan teknologi, dampak pandemi);
7. Keterbatasan kapasitas SDM dan anggaran di daerah;

#### **2.2.2.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara**

Telaahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi dilakukan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dalam dokumen tersebut mengandung implikasi kebijakan yang relevan bagi perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan kewilayahan. Oleh karena itu, isu-isu yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis daerah. Berikut ini adalah isu strategis Perangkat Daerah Provinsi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial :



1. Ketergantungan pada bantuan sosial tanpa pendampingan berkelanjutan
2. Minimnya panti sosial dan tenaga pekerja sosial profesional
3. Keterlambatan respon akibat luas wilayah dan akses terbatas
4. Bantuan sosial tidak tepat sasaran akibat data DTKS tidak terupdate

#### **2.2.2.4 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029**

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu strategis yang relevan dengan Renstra Dinas Sosial antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar

#### **2.2.2.5 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Periode 2025-2029**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Dinas Sosial agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. SDM berkualitas dan kohesivitas masyarakat. Isu ini muncul sebagai respons terhadap permasalahan mendasar yang masih dihadapi daerah, yaitu belum optimalnya jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan. Meskipun Kalimantan Utara memiliki potensi demografi yang besar, penyebaran



infrastruktur pendidikan, kualitas tenaga pendidik, dan tingkat partisipasi pendidikan menengah masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah. Tantangan ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas SDM dan semakin memperlebar kesenjangan antar kelompok masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun geografis.

#### **2.2.2.6 Potensi Daerah**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial antara lain:

1. Potensi Bonus Demografi. Bonus demografi adalah kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Di Kalimantan Utara (Kaltara), potensi ini dapat menjadi peluang besar untuk pembangunan sosial jika dikelola dengan tepat, terutama oleh Dinas Sosial

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis perangkat daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian Sosial RI, Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, KLHS RPJMD, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.8 Teknik Menyimpulkan Isu Srategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS SOSIAL	PERMASALAHAN DINAS SOSIAL	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS SOSIAL	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS SOSIAL			ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi Bonus Demografi	Jangkauan dan mutu pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan masih perlu dioptimalkan	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar	Demografi global	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas Kesehatan dan pendidikan	SDM berkualitas dan kohesivitas masyarakat
<p>Terdapat satu Gudang Logistik milik Dinas Sosial Provinsi.</p> <p>Dinas Sosial memiliki peran sebagai wakil koordinator bidang logistik pada saat terjadi bencana kewenangan Provinsi.</p> <p>Dinas Sosial berperan sebagai Koordinator temporary shelter pengungsian ketika tanggap darurat atau bencana kewenangan provinsi.</p> <p>Adanya Komitmen antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan</p>	<p>Ketersediaan fasilitas Gudang Logistik yang belum memadai.</p> <p>Minimnya ketersediaan anggaran Operasional untuk penanggulangan bencana</p> <p>Belum optimalnya fungsi temporary shelter pengungsian</p> <p>Keterbatasan sumber daya (logistik, SDM, anggaran) dalam penanganan darurat bencana</p>			<p>Pelayanan Sosial Pasca Bencana</p> <p>Kesiapsiagaan dan Respon Bencana</p> <p>Pendataan Korban dan Kelompok Rentan.</p>	<p>Kondisi Geografis wilayah Kalimantan Utara yang berdampak pada keterbatasan akses dan ketimpangan layanan sosial.</p> <p>Isu sosial karena perpindahan penduduk.</p> <p>Kurangnya SDM dan relawan sosial terlatih dalam penanganan bencana.</p> <p>Koordinasi antar instansi</p>	<p>Ketersediaan fasilitas Gudang Logistik yang belum memadai</p> <p>Minimnya ketersediaan anggaran operasional untuk penanggulangan bencana</p> <p>Belum optimalnya fungsi temporary shelter pengungsian</p> <p>Keterbatasan sumber daya (logistik, SDM, anggaran) dalam penanganan darurat bencana</p>



Utara dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam upaya penanggulangan bencana.						
---	--	--	--	--	--	--

Sumber : Ranwal RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Perangkat Daerah. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan bonus demografi untuk Pemberdayaan Sosial
2. Optimalisasi layanan dasar bagi Kelompok Rentan
3. Respons terhadap dinamika lingkungan Global-Nasional
4. Adaptasi perubahan iklim dan bencana



### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Provinsi Kalimantan Utara yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan”**

Visi RPJMD tersebut selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah. Visi tersebut mempertegas posisi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai bagian dari periode pertama pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 yang memasuki pentahapan pembangunan berupa memperkokoh fondasi



transformasi. Visi RPJMD tidak kalah penting juga memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi RPJMN, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”. Penjelasan kata kunci/kondisi di dalam visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

- **Fondasi Transformasi yang Kokoh:** merupakan arah kebijakan periode pertama dalam rangkaian periode pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Perwujudan fondasi transformasi dicapai melalui pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, pengembangan ekonomi yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta ditopang tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan stabilitas wilayah yang terjaga.
- **Beranda Depan NKRI:** merupakan letak geografis Provinsi Kalimantan Utara yang berada di wilayah terdepan NKRI dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia maupun kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Letak geografis ini sekaligus menjadi potensi dan tantangan geopolitik dan geoekonomi yang perlu dikelola dengan baik melalui tata kelola perbatasan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- **Maju:** kondisi pembangunan yang diharapkan tercapai yaitu kemajuan di segala bidang. Kemajuan memiliki arti bahwa kinerja pembangunan semakin baik atau progresif dari tahun ke tahun, sehingga masyarakat semakin menikmati manfaat nyata dari pembangunan. Maju juga diarahkan untuk tercapainya daerah yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil.
- **Makmur:** kondisi yang tercipta melalui kinerja pembangunan yang semakin baik sehingga mencapai kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan ekonomi dan sosial-budayanya. Makmur menandakan masyarakat yang semakin sejahtera atau lepas dari garis kemiskinan, serta tidak kalah penting masyarakat yang bahagia lahir dan batin. Kemakmuran merupakan hasil kolaborasi seluruh bidang pembangunan, yaitu ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat, pembangunan SDM dan sosial agar menghasilkan SDM yang unggul serta terpenuhi jaminan dan perlindungan sosialnya,



serta tata kelola yang baik untuk menopang efektivitas kinerja berbagai bidang pembangunan untuk menuju kemakmuran.

- **Berkelanjutan:** kondisi yang tercipta sebagai bentuk komitmen Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berkelanjutan merupakan kondisi dari keselarasan pembangunan antara orientasi ekonomi, sosial dan lingkungan yang ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil pembangunan tidak hanya untuk generasi saat ini, sekaligus untuk generasi masa depan. Berbagai agenda pembangunan untuk mendukung pencapaian kondisi berkelanjutan, antara lain melalui pengembangan ekonomi hijau.

Adapun misi Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif
4. Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
7. Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara berperan dalam mendukung misi ke-1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan dan misi ke-6 Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan, dengan tujuan Terlaksananya Tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas dan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, melayani dan inovatif dari RPJMD



Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Sosial yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Sosial untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya dukungancinfrastruktur yang merata, berkeadilan dan berkualitas</li> <li>- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan</li> <li>- Terciptanya stabilitas wilayah yang terjaga</li> <li>- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, melayani dan inovatif</li> <li>- Menurunnya tingkat pengangguran</li> <li>- Meratanya pembangunan wilayah, desa dan kawasan pedesaan</li> <li>- Meningkatnya kelestarian fungsilingkungan hidup</li> </ul>	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	72.5	75	77.5	78	78.25	
			Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	



<p>dan perubahan iklim</p> <p>- Tersedianya sumber dayamanusia yang berdaya saing</p> <p>- Terbangunnya wilayahperbatasan yang maju dansejahtera</p> <p>. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.</p> <p>. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</p> <p>. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin</p> <p>. Permensos 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>		Pelayanan Kesejahteraan Sosial)						
	Meningkatkan pelayanan publik, Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dan kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	93,77	93,82	93,87	93,92	93,97	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.15	85.30	85.45	85.60	85.75	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,58	87,83	88,08	88,33	88,58	
	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100	100	100	100	100	
		Persentase Pekerja	100	100	100	100	100	



			<p>Sosial /Tenaga</p> <p>Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca</p> <p>Bencana Sesuai Standar</p>						
			<p>Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga</p> <p>Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di</p> <p>Dalam Panti Rehabilitasi Sosial</p>	100	100	100	100	100	
			<p>Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga</p> <p>Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di</p> <p>Dalam Panti Rehabilitasi</p>	100	100	100	100	100	



			Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA						
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat  Kompetensi nya dalam Pelayanan Sosial	100	100	100	100	100	
		Meningkat nya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miski	100	100	100	100	100	
			Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	100	100	100	100	100	
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	100	100	100	100	100	



			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar						
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	100	100	
			Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100	100	100	100	100	
			Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	100	



		Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	100	100	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	100	
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100	100	100	100	100	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	100	

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, 2025

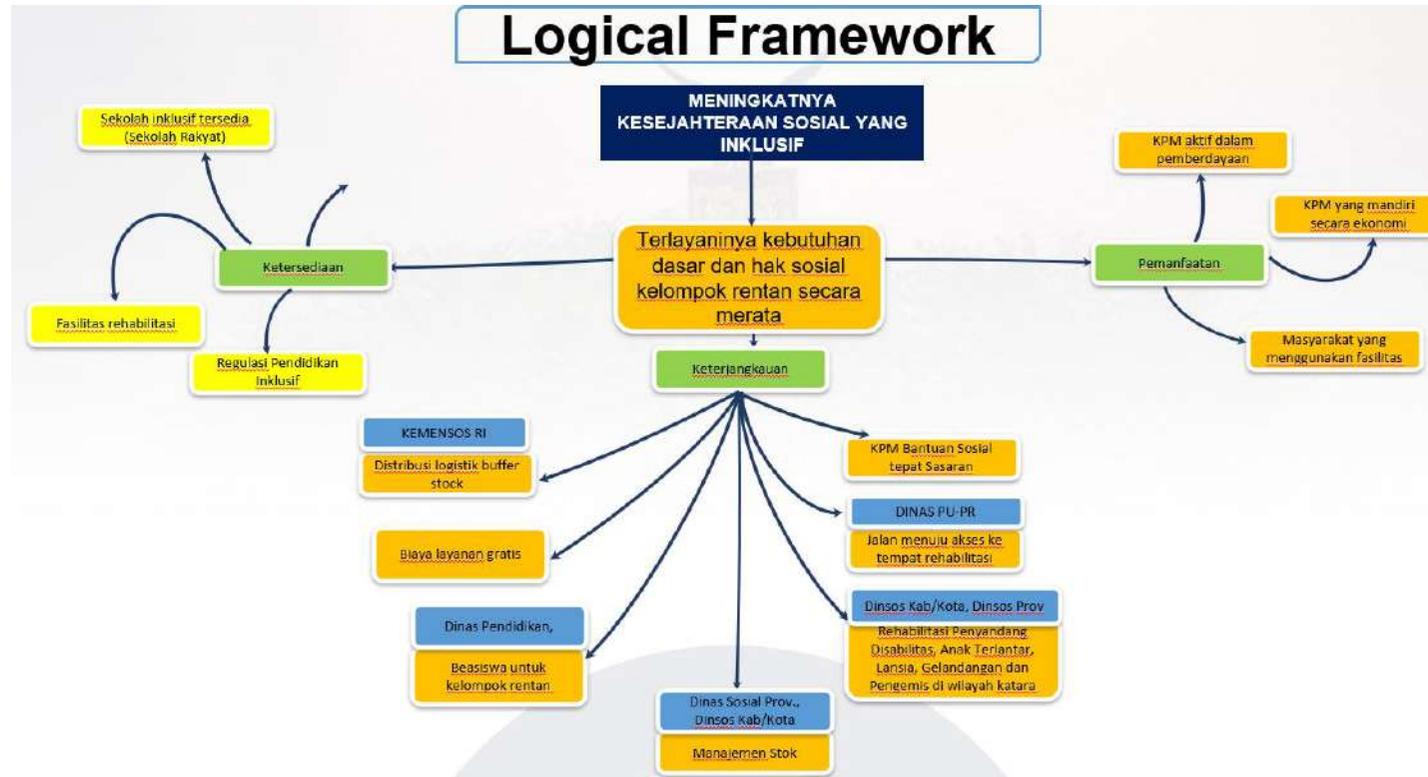
Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Dinas Sosial yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output,



outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur



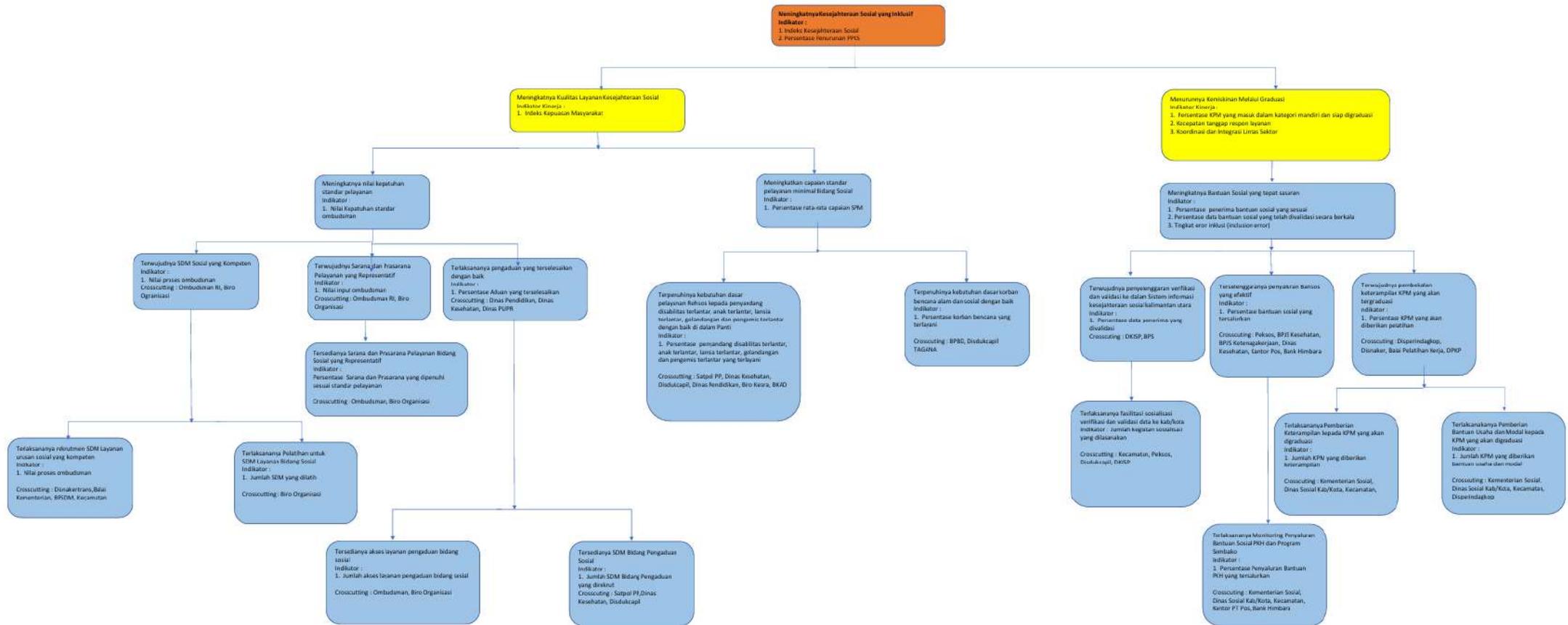
Gambar 3.1 Logical Framework Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, 2025



Gambar 3.2 Pohon Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, 2025



## 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

### 3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/sub kegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Dinas Sosial juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Sosial, yang meliputi antara lain:

**Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas Sosial**

No.	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di beberapa wilayah	Menurunnya angka kemiskinan ekstrem di tingkat provinsi  Meningkatnya akses masyarakat rentan terhadap layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.	1.Peningkatan program bantuan sosial terpadu 2.Pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat; 3.Penguatan kolaborasi dengan lintas sektor dan pihak swasta
2	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial.	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM Dinas Sosial.	1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan; 2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi kerja
3	Penanganan bencana sosial dan korban	Peningkatan kecepatan dan ketepatan	Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Sosial dan Alam, Penguatan kapasitas



	bencana alam yang belum optimal	penanganan korban bencana sosial dan alam	SDM relawan dan Tagana, dan Penyediaan dan manajemen logistik yang memadai  Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi kerja
4	Keterbatasan data dan informasi yang akurat mengenai PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial).	Tersedianya data PMKS dan PSKS yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi dan Pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi program yang lebih baik.	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kalimantan Utara (Sijosku), Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data, dan Koordinasi data dengan pemerintah kabupaten/kota

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, 2025

### 3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Sosial memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Sosial

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Akar Masalah	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1.	<p>Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.</p> <p>UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</p> <p>Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan</p> <p>Pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan</p>			<p>-Memastikan kuantitas dan kualitas program dan layanan standar pelayanan dasar (SPM) bidang sosial di dalam panti kewenangan provinsi dapat diberikan secara menyeluruh kepada penerima layanan</p> <p>-Mengoptimalkan kualitas program pelayanan dasar (SPM) bidang sosial di dalam panti kewenangan provinsi melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendamping dan tenaga kesejahteraan sosial di LKS</p>	



No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Akar Masalah	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
	<p>Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial</p>				<p>-Mengoptimalkan kualitas program pelayanan dasar (SPM) bidang sosial di dalam panti kewenangan provinsi dengan menyediakan optimalisasi sarana dan prasarana pada unit layanan rehabilitasi sosial</p> <p>-Mengoptimalkan kualitas program pelayanan dasar (SPM) bidang sosial di dalam panti kewenangan provinsi melalui penguatan kemitraan strategis dengan LKS</p> <p>-Mengoptimalkan kualitas program pelayanan dasar (SPM) bidang sosial di dalam panti kewenangan provinsi</p>	



No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Akar Masalah	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
					melalui penyediaan dan pemanfaatan data penerima layanan yang terpadu dan akurat	
2.	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan	<p>1.Pengentasan Kemiskinan terutama pada daerah afirmasi 3TP</p> <p>2.Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan</p>			<p>1.Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Rentan ( Melalui Program Keluarga Harapan serta Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan)</p> <p>2. Mengoptimalkan dukungan program, kegiatan, subkegiatan PD untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p>	
	Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan					



No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Akar Masalah	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
	Ketiga atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)					
3.	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.  UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin  Permensos 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	.Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi 3TP  .Penguatan layanan publik yang mudah dijangkau dan berbasis TIK			Mengoptimalkan bantuan sosial yang berbasis ekonomi produktif dengan pemberian bantuan stimulan modal usaha kepada masyarakat rentan sosial dan ekonomi  Mengoptimalkan pengelolaan data kesejahteraan sosial kalimantan utara melalui digitalisasi dan meningkatkan kapasitas SDM Pengelola data didaerah Kab/Kota	
4.	Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta			Memastikan data bencana valid dan terkini	



No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Akar Masalah	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p> <p>Permensos Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana</p> <p>Permensos Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana</p> <p>Permensos Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana</p>	<p>akses ke simpul utama transportasi</p>			<p>Mengoptimalkan kinerja relawan bencana dengan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas relawan sosial bencana</p> <p>Memastikan kesuaian isu strategis dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>Memastikan pemenuhan dasar masyarakat terdampak bencana terpenuhi.</p> <p>Memastikan ketersediaan logistik ketika situasi tanggap darurat .</p>	



No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Akar Masalah	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
					<p>Meningkatkan kapasitas organisasi dan personil Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana</p> <p>Memastikan ketersediaan dan pemeliharaan logistik dan lumung sosial</p> <p>Memastikan pemberian layanan dasar bagi korban bencana</p> <p>Fasilitasi bantuan sosial untuk pembangnan kembali kehidupan sosial ekonoi penyintas</p>	



No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Akar Masalah	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
					Mendorong kampung siaga bencana agar menjadi garda terdepan masyarakat tangguh bencana berbasis sosial.	

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, Data Diolah, 2025



### 3.2.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

**Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan Dasar dengan melakukan analisis kebutuhan dan analisis masalah masyarakat dalam pemberdayaan sosial	Pembangunan kapasitas melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis ataupun lokakarya dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan	Implementasi program-program pemberdayaan sosial yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan membangun kemitraan dengan pihak lain untuk meningkatkan akses ke sumber daya	Penguatan dan pengembangan program dengan mengevaluasi keberhasilan program pemberdayaan sosial, serta mengembangkan program-program pemberdayaan sosial yang berkelanjutan	Terwujudnya masyarakat Kaltara yang berdaya yang dilihat dari aspek sosial dan ekonomi
Penguatan Data dan identifikasi melalui verifikasi dan validasi data PPKS dalam panti secara berkala salah satunya dengan melakukan pemetaan kebutuhan pada setiap kategori	Peningkatan kualitas layanan dasar dan memberikan penguatan kapasitas kepada penerima layanan layanan dasar (SPM) bidang sosial kewenangan provinsi	Optimalisasi anggaran dan sumber daya melalui pengajuan usulan anggaran yang lebih memadai serta pemanfaatan teknologi untuk efisiensi pengelolaan data dan pelaporan	Penguatan kualitas layanan yang menyeluruh dengan mengimplementasikan sejumlah layanan dasar dan layanan pendukung	Pencapaian target SPM 100% dengan memastikan seluruh PPKS di dalam panti kewenangan provinsi menerima pelayanan dasar yang komprehensif dan berkualitas



TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kuantitas cakupan pelayanan dasar (SPM) bidang sosial kewenangan provinsi	Optimalisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap PSKS dalam hal ini adalah SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dan unit layanan panti/UPT	Pengembangan inovasi layanan dengan mengeksplorasi model layanan dasar (SPM) bidang sosial kewenangan provinsi berbasis komunitas (di luar panti) jika relevan dan memungkinkan	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja yang kuat
Perencanaan anggaran yang terarah berdasarkan data kebutuhan riil dan target cakupan awal melalui advokasi anggaran kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan SPM bidang sosial	Perluasan jangkauan kolaborasi penyediaan layanan dasar (SPM) bidang sosial kewenangan provinsi dengan mengidentifikasi potensi LKS serta menjalin kerjasama dengan CSR dalam mendukung program SPM Sosial	Penyempurnaan regulasi internal melalui review dan penyempurnaan SOP pelayanan pada Unit Layanan Panti/UPT dan LKS	Penguatan advokasi kebijakan dengan mendorong kebijakan daerah yang lebih mendukung pelaksanaan pelayanan dasar (SPM) serta melakukan studi pembelajaran yang komprehensif dalam memahami praktik terbaik dalam penerapan layanan dasar pada sejumlah daerah terkait penerapan SPM bidang sosial kewenangan provinsi	Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dengan mendorong peran aktif masyarakat dan keluarga dalam proses rehabilitasi serta memperkuat forum koordinasi dengan berbagai pihak terkait



TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembentukan Tim penyusun internal dari Dinas Sosial yang bertugas mengumpulkan data historis bencana, kelompok rentan, dan laporan kegiatan penanganan sosial	Penjabaran rencana program/kegiatan seperti Program perlindungan sosial korban bencana alam, program kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, pelatihan taruna siaga bencana, dan penguatan sistem peringatan dini bencana dan logistik bencana.	Melakukan konsultasi Publik dan sinkronisasi kepada masyarakat terdampak, kelompok rentan, relawan dan LSM Kebencanaan.	Finalisasi Program dan kegiatan penanganan bencana sosial	Sosialisasi, Implementasi dan pemantauan berkala daerah daerah rawan bencana.
Identifikasi Isu terkait meningkatnya Intensitas bencana, keterbatasan logistik darurat dan belum dan fokus pada tujuan serta sasaran strategis yaitu meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana serta mengurangi dampak sosial dari bencana.	menetapkan indikator kinerja seperti persentase korban bencana yang tertangani, jumlah relawan sosial yang terlatih dan jumlah lokasi rawan bencana yang telah memiliki rencana kontingensi	Penyesuaian kebijakan untuk menjamin sinergi lintas sektor	Penyusunan peta rawan bencana dan roadmap kebencanaan sosial	Pelaporan Indikator dan penanganan bencana termasuk monitoring dan evaluasi
Pengembangan Dasar dengan melakukan analisis kebutuhan dan analisis masalah masyarakat dalam Perlindungan Jaminan Sosial	Pembangunan kapasitas melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis ataupun lokakarya dalam mengelola sumber daya	Implementasi program Perlindungan Jaminan Sosial yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan membangun kemitraan dengan Kabupaten /Kota yang ada di	Penguatan dan pengembangan program dengan mengevaluasi keberhasilan program perlindungan Jaminan Sosial, serta mengembangkan sub-sub	Terwujudnya masyarakat Kaltara Mandiri dilihat dari aspek sosial dan ekonominya



TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan menghadapi tantangan	Provinsi Kalimantan Utara.	programnya yang berkelanjutan	
<p>Pemetaan Potensi Ekonomi:</p> <p>Klasifikasi penerima: Kelompok rentan (lansia, disabilitas) → bantuan berkelanjutan.</p> <p>Kelompok produktif → disiapkan untuk pemberdayaan.</p>	<p>Pelatihan berbasis potensi lokal (pertanian, UMKM, kerajinan, jasa).</p> <p>Kemitraan dengan BLK (Balai Latihan Kerja) dan dunia usaha.</p>	<p>Bantuan lanjutan peralatan, sertifikasi produk, kemasan</p> <p>Kredit mikro berbasis kelompok (KUR Mikro, pinjaman lunak BUMDes).</p> <p>Link dengan hotel, restoran, atau toko modern untuk produk UMKM.</p>	<p>Pelepasan Bantuan Sosial, Graduasi penerima yang pendapatannya melebihi garis kemiskinan.</p>	<p>KPM Mandiri dan menjadi mentor bagi KPM baru yang perlu dibantu</p>
<p>Evaluasi kualitas data DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi ) dan integrasinya dengan sistem lain (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Kalimantan Utara (SIJOSKU, data BPS).</p> <p>Pelatihan petugas pendataan (operator, relawan) tentang metode pengumpulan data berbasis digital.</p>	<p>Membangun dashboard real-time untuk memantau distribusi bantuan dan perubahan status kesejahteraan.</p> <p>Aplikasi mobile untuk pelaporan partisipatif oleh masyarakat (crowdsourcing).</p>	<p>Analisis kebutuhan dan rekomendasi program berbasis zona prioritas.</p>	<p>Sistem otomatis dengan notifikasi early warning untuk kemiskinan ekstrim.</p> <p>Koneksi dengan sistem pusat (Kemensos, Bappenas) untuk aliran data nasional.</p>	<p>Evaluasi dan Keberlanjutan</p>

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, 2025



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah**

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Sosial disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas/Badan//Sekretariat, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.



**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	n/a	70	72,5	75	77,5	78	78
			Persentase Penurunan PPKS	6.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
		Meningkatnya nilai kepatuhan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	93,67	84,00	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.46	85	85.15	85.30	85.45	85.60	85.60

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, 2025



**Tabel 4.2 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, melayani dan inovatif	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif				Indeks Kesejahteraan Sosial		
					Persentase Penurunan PPKS		
	Meningkatnya nilai kepatuhan pelayanan publik				Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
		Perangkat Daerah					
						<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
						<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatkan Pemberdayaan Sosial			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	
					Jumlah Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan	<b>Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Pengumpul an Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota yang dilaksana n sesuai ketentuan		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
						<b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>	
					1. Persentase Pekerja Sosial/Tena	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					ga Kesejahtera an Sosial yang Melaksanak an Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial 2. Persentase Pekerja Sosial/Tena ga Kesejahtera an Sosial yang Melaksanak an Pelayanan		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA 3. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Sesuai Standar 4. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Pelayanan Sosial		
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya layanan penangana		Persentase Warga Negara Migran	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			n warga negara migran korban tindak kekerasan		Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani		
						<b><i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</i></b>	
						Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
			Meningkatnya			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			rehabilitasi sosial				
					Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>	
						Penyediaan Permakanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Alat Bantu	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	
					Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti</b>	
						Penyediaan Makanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti</b>	
						Penyediaan Permakanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
						Penyediaan Alat Bantu	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti</b>	
						Pemulangan ke Daerah Asal	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	<b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b>	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	
					Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI	<b>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</b>	
						Pengangkatan Anak antar WNI	
					1. Persentase Penerima Manfaat	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandiria n Ekonomi 3. Persentase Daerah yang Melaksanak an Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Miskin 4. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Fasilitasi Pengembangan Potensi Pendamping Program Bantuan Sosial	
						Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	
						Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan Pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan Miskin	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana 2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana	<b><i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</i></b>	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					yang Meningkat Kesiapsiaga annya 3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatka n Layanan Pemulihan Sosial		
						Penyediaan Permakanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Pelayanan Dukungan Psikososial	



Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Salah satu 3 arah kebijakan prioritas pembangunan yaitu SDM Berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas nasional.

Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" diwujudkan dengan 8 Misi Asta Cita. Berikut 2 Misi Asta Cita untuk Kementerian Sosial :

Asta ke-4 = Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

- Kualitas SDM para pengelola program kesejahteraan sosial.
- Penerbitan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Memperluas program perlindungan kelompok difabel.
- Memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas

Asta ke-6 = Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

- Penggunaan basis data terpadu (BDT).
- Pemberlakuan Nomor Identitas Tunggal (Amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial).
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas program bantuan sosial.
- Mendorong kemandirian masyarakat miskin.
- Meningkatkan kualitas penyediaan panti-panti sosial.
- Mengembangkan program asistensi lanjut usia (ASLUT).
- Melanjutkan program PKH.

Ada Empat program prioritas Kementerian Sosial yang selaras dengan Asta Cita. Keempat program ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi 12 kelompok Pemerlu Atensi Sosial (12-PAS) yang menjadi sasaran utama kerja Kementerian Sosial. 12 PAS mencakup kelompok masyarakat yang menjadi



sasaran program kesejahteraan sosial yang terdiri dari anak-anak rentan, difabel, lansia terlantar, masyarakat berpendapatan rendah, korban bencana, mereka yang membutuhkan afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban NAPZA dan HIV/AIDS, masyarakat yang bermasalah sosial, dan perempuan rentan dan fakir miskin.

#### **1. Integrasi Menuju Data Tunggal Terpadu Sosial Ekonomi**

Penyelarasan berbagai data yang selama ini dikelola oleh kementerian dan lembaga. Data ini meliputi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh BPS, dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) oleh BKKBN. Integrasi ini, yang dipimpin oleh BPS, bertujuan menciptakan data terpadu dinamis sebagai acuan nasional. Dengan data tersebut, distribusi bantuan sosial (bansos) diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan merata.

#### **2. Pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera**

Kampung Sejahtera Kemensos, berlokasi di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menjadi prioritas kedua. Wilayah ini sering terdampak banjir rob. Proyek ini merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), CSR Pertamina, dan pemerintah daerah untuk menciptakan model penanganan dampak bencana yang berkelanjutan.

#### **3. Penataan Regulasi Kesejahteraan Sosial**

Prioritas ketiga adalah penguatan regulasi pelaksanaan kesejahteraan sosial. Banyaknya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tidak memiliki izin atau terlibat dalam penyimpangan menjadi perhatian utama. Upaya ini mencakup standarisasi LKS, pengaturan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), serta regulasi terkait disabilitas. Penguatan regulasi ini bertujuan mencegah insiden buruk seperti kasus pelecehan di panti asuhan ilegal di Tangerang yang terungkap pada Oktober 2024.

#### **4. Konsolidasi Nasional Pilar-pilar Sosial dan Pemerintah Daerah**

Fokus terakhir adalah memperkuat kerja sama antara pilar-pilar sosial dan pemerintah daerah. Pilar-pilar sosial ini tidak hanya bertanggung jawab atas distribusi bansos yang akuntabel, tetapi juga berperan dalam pendampingan masyarakat untuk mencapai target pengentasan kemiskinan.



Empat prioritas ini diharapkan menjadi landasan untuk mempercepat pencapaian tujuan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan efektif.

Serta program prioritas pembangunan daerah yaitu Transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan. Untuk mendukung hal tersebut diatas, program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari program penunjang (rutin) serta program prioritas yang langsung mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (penunjang)
2. Program Pemberdayaan Sosial (prioritas)
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (pendukung)
4. Program Rehabilitasi Sosial (Prioritas)
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Prioritas)
6. Program Penanganan Bencana (Prioritas)

Adapun secara rinci rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya disampaikan dalam tabel berikut :



**Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan UPT Panti Tresna Werdha Marga Rahayu**

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an ( <i>Baseline</i> 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
SOSIAL				21.800.93 1.030,00		26.591.44 2.485,56		27.710.21 6.151,53		28.106.70 7.884,27		28.824.998 .434,14		



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100%	100%	12.864.06 1.026,00	100%	13.554.43 7.843,00	100%	13.396.18 4.284,00	100%	13.899.86 4.386,00	100%	14.005.246 .491,00	
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran yang disusun  Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.00 0	4 Dokumen	70.000.00 0	4 Dokumen	70.000.00 0	4 Dokumen	70.000.00 0	4 Dokumen	70.000.000	
		1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Daerah yang disusun												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.00 0,00	2 Dokumen	30.000.00 0,00	2 Dokumen	30.000.00 0,00	3 Dokumen	30.000.00 0,00	2 Dokumen	30.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	20.000.00 0,00	1 Laporan	20.000.00 0,00	1 Laporan	20.000.00 0,00	1 Laporan	20.000.00 0,00	1 Laporan	20.000.000 ,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Laporan	1 Data	20.000.00 0,00	1 Laporan	20.000.000 ,00							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	11.511.08 0.836,00	12 Bulan	11.773.85 7.653,00	12 Bulan	12.043.20 4.094,00	12 Bulan	12.319.28 4.196,00	12 Bulan	12.602.266 .301,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	74 Orang/Bul an	10.511.08 0.836,00	74 Orang/Bul an	10.773.85 7.653,00	74 Orang/Bulan	11.043.20 4.094,00	74 Orang/Bulan	11.319.28 4.196,00	74 Orang/Bulan	11.602.266 .301,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000 .000,00	12 Dokumen	1.000.000. 000,00	12 Dokumen	1.000.000. 000,00	12 Dokumen	1.000.000 .000,00	12 Dokumen	1.000.000. 000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	250.000.000,00	12 Bulan	177.600.000,00	12 Bulan	250.000.000,00	12 Bulan	177.600.000,00	12 Bulan	250.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket			3 Paket	177.600.000,00			3 Paket	177.600.000,00			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	60 Orang	250.000.000,00			60 Orang	250.000.000,00			60 Orang	250.000.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	412.709.4 22,00	12 Bulan	912.709.4 22,00	12 Bulan	412.709.4 22,00	12 Bulan	712.709.4 22,00	12 Bulan	412.709.42 2,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.002.000 ,00	2 Paket	6.002.000, 00	2 Paket	6.002.000, 00	2 Paket	6.002.000 ,00	2 Paket	6.002.000, 00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	129.300.0 00,00	4 Paket	129.300.0 00,00	4 Paket	129.300.0 00,00	4 Paket	129.300.0 00,00	4 Paket	129.300.00 0,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	4 Paket	29.975.000,00	4 Paket	29.975.000,00	4 Paket	29.975.000,00	4 Paket	29.975.000,00	4 Paket	29.975.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	200.010.580,00	12 Paket	200.010.580,00	12 Paket	200.010.580,00	12 Paket	200.010.580,00	12 Paket	200.010.580,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.021.842,00	1 Paket	40.021.842,00	1 Paket	40.021.842,00	1 Paket	40.021.842,00	1 Paket	40.021.842,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.400.000 ,00	12 Dokumen	7.400.000, 00	12 Dokumen	7.400.000, 00	12 Dokumen	7.400.000 ,00	12 Dokumen	7.400.000, 00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			1 Laporan	300.000.0 00,00			1 Laporan	300.000.0 00,00			



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			1 Dokumen	200.000.0 00,00								
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Unit	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	0 Unit	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00		



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan												
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	36 Laporan	36 Laporan	331.563.2 68,00	36 Laporan	331.563.2 68,00	36 Laporan	331.563.2 68,00	36 Laporan	331.563.2 68,00	36 Laporan	331.563.26 8,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	17.400.00 0,00	12 Laporan	17.400.00 0,00	12 Laporan	17.400.00 0,00	12 Laporan	17.400.00 0,00	12 Laporan	17.400.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.999.492,00	12 Laporan	1.999.492,00	12 Laporan	1.999.492,00	12 Laporan	1.999.492,00	12 Laporan	1.999.492,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	312.163.776,00	12 Laporan	312.163.776,00	12 Laporan	312.163.776,00	12 Laporan	312.163.776,00	12 Laporan	312.163.776,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	23 Unit	23 Unit	288.707.500,00	23 Unit	288.707.500,00	23 Unit	288.707.500,00	23 Unit	288.707.500,00	24 Unit	338.707.500,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.950.000,00	1 Unit	42.950.000,00	1 Unit	42.950.000,00	1 Unit	42.950.000,00	1 Unit	42.950.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	215.997.500,00	7 Unit	215.997.500,00	7 Unit	215.997.500,00	7 Unit	215.997.500,00	7 Unit	215.997.500,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	29.760.000,00	15 Unit	29.760.000,00	15 Unit	29.760.000,00	15 Unit	29.760.000,00	15 Unit	29.760.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	0 Unit									1 Unit	50.000.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Dipelihara/Direhabilitasi												
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial (Persentase)			1.532.406 .208,00		1.639.674. 642,56		1.754.451. 867,53		1.877.263 .498,27		2.008.671. 943,14	
<i>Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan			269.793.4 88,00		288.679.0 32,16		308.886.5 64,41		330.508.6 23,92		353.644.22 7,59	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	5 Dokumen	269.793.4 88,00	5 Dokumen	288.679.0 32,16	5 Dokumen	308.886.5 64,41	5 Dokumen	330.508.6 23,92	5 Dokumen	353.644.22 7,59	



Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial		1.262.612 .720,00		1.350.995. 610,40		1.445.565. 303,12		1.546.754 .874,35		1.655.027. 715,55
	2. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA										
	3. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial										



<p>dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Sesuai Standar</p> <p>4. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensiny a dalam Pelayanan Sosial</p> <p>5. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial</p>													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	76 Orang	80 Orang	596.296.1 80,00	80 Orang	638.036.9 12,60	80 Orang	682.699.4 96,48	80 Orang	730.488.4 61,24	80 Orang	781.622.65 3,52	Mendukung ASTA CITA ke 4 dan 6
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya	0 Keluarga	20 Keluarga	119.842.1 80,00	20 Keluarga	128.231.1 32,60	20 Keluarga	137.207.3 11,88	20 Keluarga	146.811.8 23,71	20 Keluarga	157.088.65 1,37	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Keluarga Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi												
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi	25 Lembaga	25 Lembaga 546.474.360,00	25 Lembaga 584.727.565,20	25 Lembaga 625.658.494,76	25 Lembaga 669.454.589,40	25 Lembaga 716.316.410,66						Mendukung ASTA CITA ke 4 dan 6
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00		



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani			10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.000 ,00							
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah	10 Orang	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kabupaten/Ko ta												
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial (Bahasa Indikator/Pers entase/Jumlah )			1.892.290 .710,00		4.540.250. 000,00		5.282.500. 000,00		4.647.500 .000,00		4.814.000. 000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya			354.076.540,00	0,00	810.000.000,00	0,00	922.500.000,00	0,00	902.500.000,00	0,00	1.119.000.000,00	Mendukung ASTA CITA ke 4 dan 6, SPM
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang	45.000.000,00	20 Orang	180.000.000,00	25 Orang	225.000.000,00	25 Orang	225.000.000,00	30 Orang	324.000.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	20 Orang	30.000.000,00	25 Orang	37.500.000,00	25 Orang	37.500.000,00	30 Orang	45.000.000,00	
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	0 Orang			20 Orang	80.000.000,00	25 Orang	80.000.000,00	25 Orang	80.000.000,00	30 Orang	80.000.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	13 Orang	20 Orang	50.000.000,00	20 Orang	50.000.000,00	25 Orang	50.000.000,00	25 Orang	50.000.000,00	30 Orang	80.000.000,00	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	0 Orang			20 Orang	10.000.000,00	25 Orang	20.000.000,00	25 Orang	20.000.000,00	30 Orang	25.000.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	0 Orang	20 Orang	94.753.27 0,00	20 Orang	80.000.00 0,00	25 Orang	80.000.00 0,00	25 Orang	80.000.00 0,00	30 Orang	100.000.00 0,00	
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	0 Orang	20 Orang	60.523.27 0,00	20 Orang	60.000.00 0,00	25 Orang	60.000.00 0,00	25 Orang	60.000.00 0,00	30 Orang	80.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	0 Orang			20 Orang	50.000.00 0,00	25 Orang	80.000.00 0,00	25 Orang	80.000.00 0,00	30 Orang	100.000.00 0,00	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	0 Orang			1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	15.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	0 Orang			1 Orang	10.000.000,00	1 Orang	10.000.000,00	1 Orang	10.000.000,00	1 Orang	15.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina	Kabupaten/Kota			1 Kabupaten/Kota	60.000.000,00	2 Kabupaten/Kota	80.000.000,00	1 Kabupaten/Kota	60.000.000,00	1 Kabupaten/Kota	60.000.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	sesuai dengan Kewenangann ya.												
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang			1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kewenangan Provinsi												
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependuduka n bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang			1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	15.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraan nya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang			1 Orang	10.000.000,00							
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk	Orang			1 Orang	10.000.000,00							



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kemandirian Ekonomi												
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	0 Dokumen	1 Dokumen	83.800.00 0,00	10 Dokumen	150.000.0 00,00	10 Dokumen	150.000.0 00,00	10 Dokumen	150.000.0 00,00	10 Dokumen	150.000.00 0,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			1.112.608.720,00		1.815.250.000,00		2.340.000.000,00		2.340.000.000,00		2.340.000.000,00	Mendukung ASTA CITA ke 4 dan 6, SPM
Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	0 Orang			1 Orang	15.000.000,00							
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	0 Orang	300 Orang	150.000.000,00	160 Orang	160.000.000,00	200 Orang	200.000.000,00	200 Orang	200.000.000,00	200 Orang	200.000.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kewenangan Provinsi												
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	0 Orang	150 Orang	200.000.0 00,00	160 Orang	250.000.0 00,00	200 Orang	500.000.0 00,00	200 Orang	500.000.0 00,00	200 Orang	500.000.00 0,00	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	0 Orang	30 Orang	20.000.00 0,00	160 Orang	70.000.00 0,00	200 Orang	90.000.00 0,00	200 Orang	90.000.00 0,00	200 Orang	90.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kewenangan Provinsi												
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	0 Orang	300 Orang	106.755.450,00	160 Orang	200.000.000,00	200 Orang	250.000.000,00	200 Orang	250.000.000,00	200 Orang	250.000.000,00	
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	0 Orang	100 Orang	57.853.270,00	160 Orang	150.000.000,00	200 Orang	180.000.000,00	200 Orang	180.000.000,00	200 Orang	180.000.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kewenangan Provinsi												
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	0 Orang			5 Orang	50.000.000,00							
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	0 Orang			1 Orang	10.000.000,00							



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kewenangan Provinsi												
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	0 Orang			1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.000 ,00	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	814 Orang	600 Orang	450.000.0 00,00	787 Orang	590.250.0 00,00	900 Orang	675.000.0 00,00	900 Orang	675.000.0 00,00	900 Orang	675.000.00 0,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kewenangan Provinsi												
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	0 Dokumen	1 Dokumen	128.000.0 00,00	9 Dokumen	200.000.0 00,00	9 Dokumen	250.000.0 00,00	9 Dokumen	250.000.0 00,00	9 Dokumen	250.000.00 0,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	0 Orang			7 Orang	60.000.00 0,00	7 Orang	60.000.00 0,00	7 Orang	60.000.00 0,00	7 Orang	60.000.000 ,00	
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraan nya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	0 Orang			1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	0 Orang			1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.000 ,00	
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	0 Orang			1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.			
			2026		2027		2028		2029		2030					
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
	Kewenangan Provinsi															
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	"Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependuduka n Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	0 Orang			1 Orang	10.000.00 0,00		1 Orang	10.000.00 0,00		1 Orang	10.000.00 0,00		1 Orang	10.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	0 Orang			1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.000 ,00	
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			171.653.2 70,00		710.000.0 00,00		710.000.0 00,00		845.000.0 00,00		795.000.00 0,00	Mendukung ASTA CITA ke 4 dan 6, SPM
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan	15 Orang	10 Orang	30.000.00 0,00	10 Orang	180.000.0 00,00	10 Orang	180.000.0 00,00	15 Orang	270.000.0 00,00	15 Orang	270.000.00 0,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	0 Orang	10 Orang	15.000.00 0,00	10 Orang	30.000.00 0,00	10 Orang	30.000.00 0,00	15 Orang	45.000.00 0,00	15 Orang	45.000.000 ,00	
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	0 Orang	10 Orang	20.000.00 0,00	10 Orang	100.000.0 00,00	10 Orang	100.000.0 00,00	15 Orang	80.000.00 0,00	15 Orang	30.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	0 Orang	10 Orang	20.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	15 Orang	80.000.000,00	15 Orang	80.000.000,00	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	0 Orang	10 Orang	15.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	15 Orang	50.000.000,00	15 Orang	50.000.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	0 Orang	10 Orang	41.653.270,00	10 Orang	50.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	15 Orang	60.000.000,00	15 Orang	60.000.000,00	
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	"Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,	0 Orang			10 Orang	50.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	15 Orang	60.000.000,00	15 Orang	60.000.000,00	
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi"	0 Orang			1 Orang	10.000.000,00							



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	0 Orang			5 Orang	50.000.00 0,00	5 Orang	50.000.00 0,00	5 Orang	50.000.00 0,00	5 Orang	50.000.000 ,00	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	0 Orang			1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	0 Orang			1 Orang	10.000.000,00							
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	0 Orang			1 Orang	10.000.000,00							



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	9 Dokumen	100.000.000,00	9 Dokumen	100.000.000,00	9 Dokumen	100.000.000,00	9 Dokumen	100.000.000,00	
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	0 Orang			1 Orang	10.000.000,00	1 Orang	10.000.000,00	1 Orang	10.000.000,00	1 Orang	10.000.000,00	
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi			233.952.180,00		1.000.000.000,00		1.105.000.000,00		355.000.000,00		355.000.000,00	Mendukung ASTA CITA ke 4 dan 6, SPM



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kebutuhan Dasarnya												
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0 Orang			0 Orang	0,00	10 Orang	5.000.000, 00	10 Orang	5.000.000 ,00	10 Orang	5.000.000, 00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	0 Orang			0 Orang	0,00	10 Orang	5.000.000,00	10 Orang	5.000.000,00	10 Orang	5.000.000,00	
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	0 Orang			10 Orang	800.000.000,00	10 Orang	800.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	0 Orang			0 Orang	0	10 Orang	20.000.00 0,00	10 Orang	20.000.00 0,00	10 Orang	20.000.000 ,00	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	0 Orang			0 Orang	0,00	10 Orang	5.000.000, 00	10 Orang	5.000.000 ,00	10 Orang	5.000.000, 00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari Kewenangan Provinsi	0 Orang			0 Orang	0,00	10 Orang	5.000.000, 00	10 Orang	5.000.000 ,00	10 Orang	5.000.000, 00	
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	0 Orang			0 Orang	0,00	10 Orang	5.000.000, 00	10 Orang	5.000.000 ,00	10 Orang	5.000.000, 00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	0 Orang			0 Orang	0	1 Orang	15.000.000,00	1 Orang	15.000.000,00	1 Orang	15.000.000,00	
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	44 Orang	10 Orang	202.250.000,00	10 Orang	150.000.000,00							



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	0 Dokumen	1 Dokumen	31.702.18 0,00	5 Dokumen	50.000.00 0,00	5 Dokumen	50.000.00 0,00	5 Dokumen	50.000.00 0,00	5 Dokumen	50.000.000 ,00	
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependuduka n Bagi Gelandangan dan Pengemis	0 Orang			0 Orang	0	1 Orang	5.000.000, 00	1 Orang	5.000.000 ,00	1 Orang	5.000.000, 00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kewenangan Provinsi												
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	0 Orang			0 Orang	0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.000 ,00	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0 Orang			0 Orang	0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kewenangan Provinsi												
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	0 Orang		0 Orang	0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.000 ,00		
Pemulasaraan	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraan nya bagi gelandangan dan pengemis	0 Orang		0 Orang	0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.000 ,00		



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	kewenangan provinsi												
<i>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</i>	<i>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya</i>		20.000.00 0,00	205.000.0 00,00	205.000.0 00,00	205.000.0 00,00	205.000.0 00,00	205.000.0 00,00	205.000.0 00,00	205.000.00 0,00			



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0 Orang			5 Orang	45.000.00 0,00	5 Orang	45.000.00 0,00	5 Orang	45.000.00 0,00	5 Orang	45.000.000 ,00	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	0 Orang			5 Orang	5.000.000, 00	5 Orang	5.000.000, 00	5 Orang	5.000.000 ,00	5 Orang	5.000.000, 00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	0 Orang			5 Orang	20.000.00 0,00	5 Orang	20.000.00 0,00	5 Orang	20.000.00 0,00	5 Orang	20.000.000 ,00	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	0 Orang			5 Orang	15.000.00 0,00	5 Orang	15.000.00 0,00	5 Orang	15.000.00 0,00	5 Orang	15.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	0 Orang			5 Orang	10.000.00 0,00	5 Orang	10.000.00 0,00	5 Orang	10.000.00 0,00	5 Orang	10.000.000 ,00	
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	0 Orang			5 Orang	10.000.00 0,00	5 Orang	10.000.00 0,00	5 Orang	10.000.00 0,00	5 Orang	10.000.000 ,00	
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan	0 Orang			5 Orang	10.000.00 0,00	5 Orang	10.000.00 0,00	5 Orang	10.000.00 0,00	5 Orang	10.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Dasar Kewenangan Provinsi												
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	0 Orang		1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.000 ,00		



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	0 Orang			5 Orang	10.000.00 0,00	5 Orang	10.000.00 0,00	5 Orang	10.000.00 0,00	5 Orang	10.000.000 ,00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan	Dokumen	1 Dokumen	20.000.00 0,00	1 Dokumen	25.000.00 0,00	1 Dokumen	25.000.00 0,00	1 Dokumen	25.000.00 0,00	1 Dokumen	25.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA												
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependuduka n Bagi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	0 Orang			1 Orang	5.000.000, 00	1 Orang	5.000.000, 00	1 Orang	5.000.000 ,00	1 Orang	5.000.000, 00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kewenangan Provinsi												
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	0 Orang		1 Orang	5.000.000, 00	1 Orang	5.000.000, 00	1 Orang	5.000.000 ,00	1 Orang	5.000.000, 00		



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kewenangan Provinsi												
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	0 Orang			1 Orang	5.000.000, 00	1 Orang	5.000.000, 00	1 Orang	5.000.000 ,00	1 Orang	5.000.000, 00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	0 Orang			1 Orang	10.000.000,00							



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	0 Orang			1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.00 0,00	1 Orang	10.000.000 ,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi	0 Orang			1 Orang	10.000.000,00							



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	0 Orang												
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		3.325.253.086,00		3.755.000.000,00		4.055.000.000,00		4.385.000.000,00		4.760.000.000,00			



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
<i>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</i>	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI			44.050.00 0,00	3 Orang	60.000.00 0,00	3 Orang	60.000.00 0,00	3 Orang	60.000.00 0,00	3 Orang	60.000.000 ,00	
Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	10 Orang	3 Orang	44.050.00 0,00	3 Orang	60.000.00 0,00	3 Orang	60.000.00 0,00	3 Orang	60.000.00 0,00	3 Orang	60.000.000 ,00	



Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar			3.281.203 .086,00	0,00	3.695.000. 000,00	0,00	3.995.000. 000,00	0,00	4.325.000 .000,00	0,00	4.700.000. 000,00
	2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi											
	3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin											
	4. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi											



	dari Kemiskinan												
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	610 Orang	700 Orang	983.867.545,00	750 Orang	1.100.000.000,00	800 Orang	1.250.000.000,00	850 Orang	1.400.000.000,00	900 Orang	1.600.000.000,00	Mendukung ASTA CITA ke 4 dan 6
Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kab/kota	5 Kab/kota	247.335.000,00	5 Kab/kota	250.000.000,00							



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	235 Orang	225 Orang	1.500.000.000,00	250 Orang	1.725.000.000,00	270 Orang	1.825.000.000,00	290 Orang	1.925.000.000,00	300 Orang	2.000.000.000,00	Mendukung ASTA CITA ke 4 dan 6
Fasilitasi Pengembangan Potensi Pendamping Program Bantuan Sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	Orang	30 Orang	150.000.000,00	35 Orang	170.000.000,00	35 Orang	170.000.000,00	38 Orang	200.000.000,00	38 Orang	200.000.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Dokumen	5 Dokumen	200.000.0 00,00	5 Dokumen	150.000.0 00,00	5 Dokumen	150.000.0 00,00	5 Dokumen	150.000.0 00,00	5 Dokumen	150.000.00 0,00	
Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	Orang	20 Orang	200.000.5 41,00	40 Orang	300.000.0 00,00	50 Orang	350.000.0 00,00	60 Orang	400.000.0 00,00	70 Orang	500.000.00 0,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana			2.176.920 .000,00		3.092.080. 000,00		3.212.080. 000,00		3.287.080 .000,00		3.227.080. 000,00	



Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana			2.176.920 .000,00		3.092.080. 000,00		3.212.080. 000,00		3.287.080 .000,00		3.227.080. 000,00	Mendukung ASTA CITA ke 4 dan 6, SPM
	2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaan nya												
	3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial												



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	400 Orang	280.000.0 00,00	400 Orang	560.000.0 00,00	400 Orang	560.000.0 00,00	400 Orang	560.000.0 00,00	400 Orang	560.000.00 0,00	
Penyediaan Sandang	Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	200 Orang	280.000.0 00,00	200 Orang	280.000.0 00,00	200 Orang	280.000.0 00,00	200 Orang	280.000.0 00,00	200 Orang	280.000.00 0,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	2 Orang	25.000.00 0,00	1 Unit	25.000.000 ,00							
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Orang	100 Orang	130.000.0 00,00	100 Orang	130.000.0 00,00	100 Orang	130.000.0 00,00	100 Orang	130.000.0 00,00	100 Orang	130.000.00 0,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	100 Orang	1.043.120.000,00	200 Orang	1.473.280.000,00	200 Orang	1.473.280.000,00	200 Orang	1.673.280.000,00	200 Orang	1.673.280.000,00	
Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang			50 Orang	155.000.000,00			70	200.000.000,00			



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang					30 Orang	125.000.000,00			40 Orang	140.000.000,00	
Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang											
Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung	Orang	200 Orang	80.800.000,00	200 Orang	80.800.000,00	200 Orang	80.800.000,00	200 Orang	80.800.000,00	200 Orang	80.800.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Berupa Uang Tunai												
Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	50 Orang	70.000.000,00	50 Orang	70.000.000,00	50 Orang	70.000.000,00	50 Orang	70.000.000,00	50 Orang	70.000.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Daerah					2 Daerah	200.000.000,00						
Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan	Dokumen												



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	rawan konflik sosial												
Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Orang	34 Orang	268.000.000,00	34 Orang	268.000.000,00	34 Orang	268.000.000,00	34 Orang	268.000.000,00	34 Orang	268.000.000,00	
Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Desa/Kelurahan			1 Desa	50.000.000,00							



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				21.800.93 1.030,00		26.601.44 2.485,56		27.725.21 6.151,53		28.121.70 7.884,27		28.839.998 .434,14	
<b>UPT PANTI TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU</b>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
SOSIAL				7.723.802 .090,00		6.586.702. 090,00		7.090.202. 090,00		6.946.102 .090,00		6.458.602. 090,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggar ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	%	100%	5.224.202 .090,00	100%	4.079.602. 090,00	100%	4.580.602. 090,00	100%	4.453.102 .090,00	100%	3.965.602. 090,00	
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	631.102.0 90,00	12 Bulan	631.102.0 90,00	12 Bulan	631.102.0 90,00	12 Bulan	631.102.0 90,00	12 Bulan	631.102.09 0,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	12 Dokumen	631.102.0 90,00	12 Dokumen	631.102.0 90,00	12 Dokumen	631.102.0 90,00	12 Dokumen	631.102.0 90,00	12 Dokumen	631.102.09 0,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	Pelaksanaan Tugas ASN													
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	34.600.00 0,00	12 Bulan	42.000.00 0,00	12 Bulan	10.000.00 0,00	12 Bulan	10.000.00 0,00	12 Bulan	10.000.000 ,00		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	2 paket	24.600.00 0,00	1 paket	32.000.00 0,00								



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	4 orang	10.000.00 0,00	4 orang	10.000.00 0,00	4 orang	10.000.00 0,00	4 orang	10.000.00 0,00	4 orang	10.000.000 ,00	
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	294.500.0 00,00	12 Bulan	312.500.0 00,00	12 Bulan	195.500.0 00,00	12 Bulan	170.500.0 00,00	12 Bulan	205.500.00 0,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan	1 Paket	1 Paket	2.500.000 ,00	1 Paket	2.500.000, 00	1 Paket	2.500.000, 00	1 Paket	2.500.000 ,00	1 Paket	2.500.000, 00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kantor yang Disediakan												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10 paket	109.000.000,00	9 paket	76.500.000,00	2 paket	40.000.000,00	3 paket	15.000.000,00	2 paket	50.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	1 Paket	130.500.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	1 Paket	3 paket	100.000.000,00	3 paket	100.000.000,00	3 paket	100.000.000,00	3 paket	100.000.000,00	3 paket	100.000.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kantor yang Disediakan												
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.000.00 0,00	1 Paket	3.000.000, 00	1 Paket	3.000.000, 00	1 Paket	3.000.000 ,00	1 Paket	3.000.000, 00	
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Unit	44 Unit	245.000.0 00,00	15 Unit	75.000.00 0,00	109 Unit	725.000.0 00,00	16 Unit	622.500.0 00,00	10 Unit	100.000.00 0,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 Unit	3 Unit	120.000.0 00,00			1 Unit	600.000.0 00,00	1 Unit	600.000.0 00,00			
Pengadaan Mebel atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan g Disediakan	0 Unit	41 Unit	125.000.0 00,00	15 Unit	75.000.00 0,00	108 Unit	125.000.0 00,00	15 Unit	22.500.00 0,00	10 Unit	100.000.00 0,00	
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	41 Laporan	48 Laporan	904.000.0 00,00	48 Laporan	904.000.0 00,00	48 Laporan	904.000.0 00,00	48 Laporan	904.000.0 00,00	48 Laporan	904.000.00 0,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	12 laporan	4.000.000,00	12 laporan	4.000.000,00	12 laporan	4.000.000,00	12 laporan	4.000.000,00	12 laporan	4.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	130.000.000,00	12 laporan	130.000.000,00	12 laporan	130.000.000,00	12 laporan	130.000.000,00	12 laporan	130.000.000,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	12 Laporan	12 laporan	70.000.000,00	12 laporan	70.000.000,00	12 laporan	70.000.000,00	12 laporan	70.000.000,00	12 laporan	70.000.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	kantor yang disediakan												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00	12 Laporan	700.000.000,00	12 Laporan	700.000.000,00	12 Laporan	700.000.000,00	12 Laporan	700.000.000,00	
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa	5 Unit	12 Unit	3.115.000.000,00	12 Unit	2.115.000.000,00							



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pemeliharaannya												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	9 Unit	105.000.000,00	9 Unit	105.000.000,00	9 Unit	105.000.000,00	9 Unit	105.000.000,00	9 Unit	105.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	1 paket	5.000.000,00	1 paket	5.000.000,00	1 paket	5.000.000,00	1 paket	5.000.000,00	1 paket	5.000.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	yang Dipelihara												
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	2 Unit	5.000.000 ,00	2 Unit	5.000.000, 00	2 Unit	5.000.000, 00	2 Unit	5.000.000 ,00	2 Unit	5.000.000, 00	
Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	2 Unit	1 Unit	3.000.000 .000,00	1 Unit	2.000.000. 000,00	1 Unit	2.000.000. 000,00	1 Unit	2.000.000 .000,00	1 Unit	2.000.000. 000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			2.499.600.000,00		2.507.100.000,00		2.509.600.000,00		2.493.000.000,00		2.493.000.000,00	Mendukung ASTA CITA ke 4 dan 6, SPM
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan	40 Orang	50 orang	1.700.000.000,00	50 orang	1.700.000.000,00	50 orang	1.700.000.000,00	50 orang	1.700.000.000,00	50 orang	1.700.000.000,00	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun	40 Orang	50 orang	195.000.000,00	50 orang	195.000.000,00	50 orang	195.000.000,00	50 orang	195.000.000,00	50 orang	195.000.000,00	



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kewenangan Provinsi												
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	0 Orang	14 orang 13.600.00 0,00	8 orang 21.100.00 0,00	10 orang 23.600.00 0,00	6 orang 7.000.000 ,00	6 orang 7.000.000 00						



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiat an /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 Orang	50 orang 250.000.0 00,00	50 orang 250.000.0 00,00	50 orang 250.000.0 00,00	50 orang 250.000.0 00,00	50 orang 250.000.0 00,00	50 orang 250.000.0 00,00	50 orang 250.000.0 00,00	50 orang 250.000.0 00,00	50 orang 250.000.00 0,00		
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	0 Orang	50 orang 306.000.0 00,00	50 orang 306.000.0 00,00	50 orang 306.000.0 00,00	50 orang 306.000.0 00,00	50 orang 306.000.0 00,00	50 orang 306.000.0 00,00	50 orang 306.000.0 00,00	50 orang 306.000.0 00,00	50 orang 306.000.00 0,00		



Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ /Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependuduka n bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	0 Orang	3 orang	15.000.00 0,00	3 orang	15.000.00 0,00	3 orang	15.000.00 0,00	3 orang	15.000.00 0,00	3 orang	15.000.000 ,00	
Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	40 Orang	10 orang	20.000.00 0,00	10 orang	20.000.00 0,00	10 orang	20.000.00 0,00	10 orang	20.000.00 0,00	10 orang	20.000.000 ,00	
				7.723.802 .090		6.586.702. 090		7.090.202. 090		6.946.102 .090		6.458.602. 090	

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan UPT Panti Tresna Werdha Marga Rahayu, Data Diolah, 2025



Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.



Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	Program Pemberdayaan Sosial	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi / Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	
		Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi / Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Provinsi	
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi / Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
		Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi / Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, 2025



#### 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	70,00	72,50	75	77,50	78	78,25	IKU
2	Persentase Penurunan PPKS	%	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	IKU
3	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	93,72	93,77	93,82	893,87	93,92	93,97	IKU
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,00	85,15	85,30	85,45	85,60	85,75	IKU
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,33	87,58	87,83	88,08	88,33	88,58	IKU

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, 2025



Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat outcome-oriented dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas/Badan/Sekretariat telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	SPM
2.	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	SPM
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	SPM



4.	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
5.	Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan /atau gelandangan dan pengemis di dalam panti yang layak dan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
6.	Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan /atau gelandangan dan pengemis sesuai standar kompetensi dan/atau layanan	%	35 Orang	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
8.	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	100	



11.	Persentase sarana prasarana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase Pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Orang	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	
15.	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Selain IKK, terdapat beberapa indikator pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan sosial, salah satunya adalah indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Berangkat dari isu strategis peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar dan arah kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah afirmasi 3TP di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif, Dinas Sosial Provinsi umumnya mendukung tujuan SDGs (Sustainable Development Goals), terutama yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan inklusi. Salah satu aspek penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah "Prinsip No One Left Behind" (Tidak Meninggalkan Siapa Pun). Ini berarti pembangunan harus inklusif, adil, dan merata, dengan memastikan bahwa kelompok rentan (seperti masyarakat miskin, disabilitas, perempuan, anak-anak, dan minoritas) tidak tertinggal, sebagaimana tercantum dalam *dan* Tujuan ke-2 SDGs: "*Tanpa Kelaparan*". Perlindungan dan Jaminan Sosial menjadi kunci dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing ekonomi suatu negara. Integrasi target dan indikator SDGs ke dalam dokumen Renstra bukan hanya



komitmen administratif, tetapi langkah nyata untuk memastikan bahwa pembangunan nasional dan daerah berjalan sejalan dengan tujuan global, sekaligus menciptakan dampak yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Setelah memetakan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara mendukung 2 indikator SDGs .

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%							Bidang PFM
2.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Keluarga							Bidang Linjamsos (PKH)
3.	Koefisien Gini	Indeks							Bidang PFM
4.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%							Bidang PFM
5.	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Daerah							Bidang PFM
6.	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	%							Bidang PFM



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial ini berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Sosial. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antar perangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara.

### **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan,



penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial. Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2045 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Utara periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan



prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

### 5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulai yang berlaku.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Sosial sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Utara,

2025

Kepala Dinas Sosial



**Obed Daniel L.T., S.Hut., M.M.**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 197208221997031008